

VISI, MISI & PROGRAM

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten 2017 - 2022



CERDAS - BERPENGALAMAN - MERAKYAT

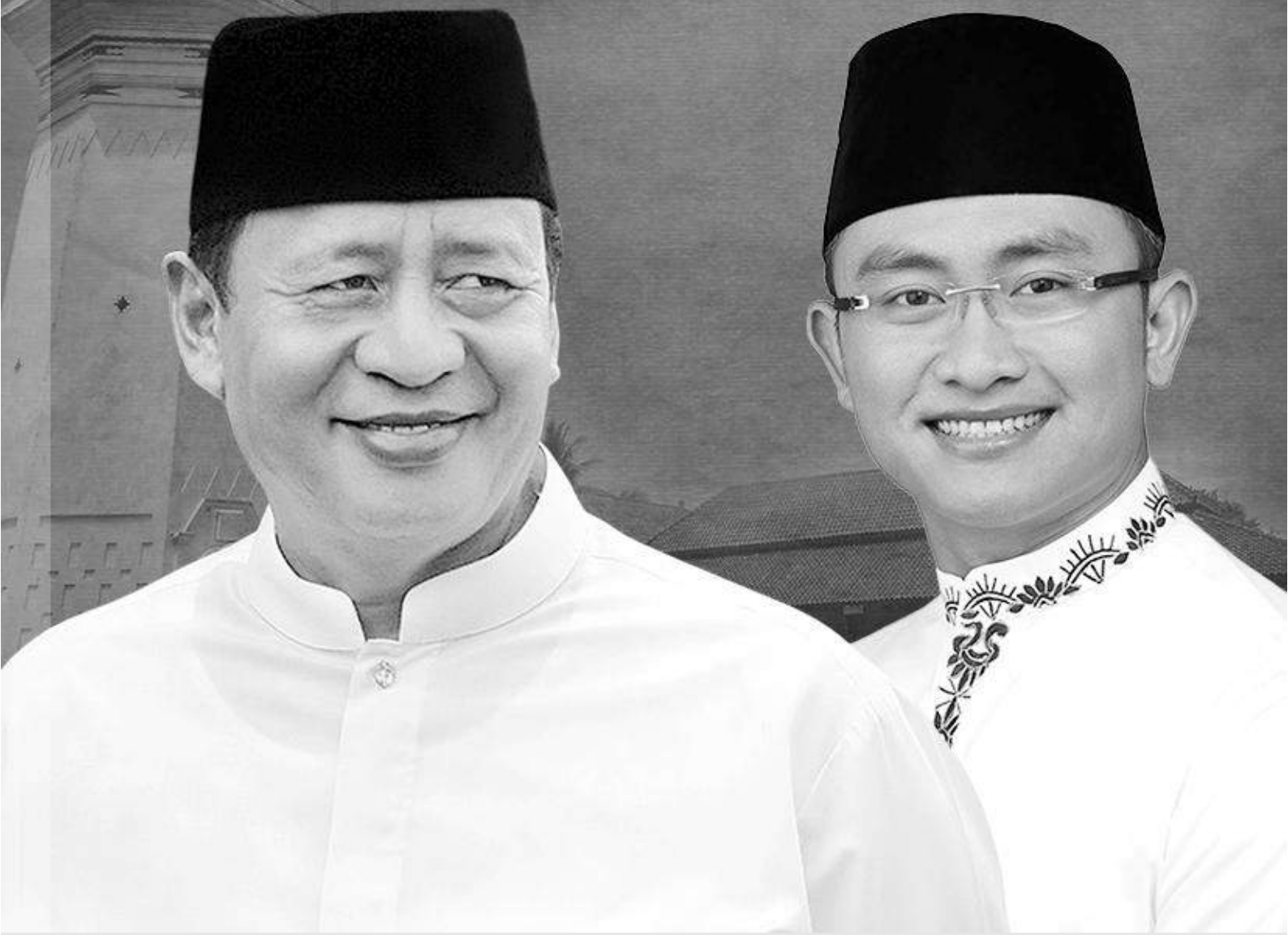
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

ENERGIK - VISIONER

H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP

VISI, MISI & PROGRAM

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten 2017 - 2022



CERDAS - BERPENGALAMAN - MERAKYAT

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

ENERGIK - VISIONER

H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP



VISI, MISI DAN PROGRAM

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022

PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam semua tingkatan memiliki fungsi yaitu *melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan menjalankan fungsi regulasi*. Agar pelaksanaan berbagai fungsi tersebut berjalan efektif, pada pemerintahan daerah disusun pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaan sesuai dengan masa jabatan masing-masing pimpinan daerah. Fungsi pemerintahan dimaksud dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang secara umum terdiri dari variabel pendidikan, kesehatan serta daya beli masyarakat.

Hakikat Pembangunan Daerah pada dasarnya menyangkut empat perubahan mendasar. Antara lain: perubahan struktur sosial daerah, perubahan sikap mental atau kebudayaan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengentasan kemiskinan daerah termasuk pengangguran dan ketimpangan. Empat hal perubahan ini sejatinya menjadi inti pembangunan daerah tak terkecuali di Provinsi Banten.

Namun kenyataannya, melihat kondisi pembangunan saat ini, perubahan yang dijanjikan masih jauh dari harapan. Sejak berdiri tahun 2000 lalu, cita-cita **mewujudkan Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera** seperti termaktub dalam Visi Pembangunan Banten Tahun 2005-2025 *belum tercapai* sesuai tahapan dan target perencanaan. Begitu banyak persoalan berikut tantangan yang dihadapi sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat dengan indikator angka indeks pembangunan manusia masih menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Ketimpangan antar penduduk dengan indikator indeks keparahan masih menunjukkan adanya kesenjangan



antar penduduk kaya dengan penduduk miskin. Demikian juga ketimpangan antar wilayah banten bagian barat dengan timur serta utara dengan selatan secara kasat mata menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perubahan serta kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan bersama, kami uraikan **Visi dan Misi** calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022. **Visi dan Misi** ini menjadi tekad pembangunan kami untuk dijalankan sepenuh hati, penuh pengabdian dan tanggungjawab, kepada Tuhan YME dan kepada rakyat Banten, periode lima tahun mendatang.

PERMASALAHAN UMUM DI BANTEN

1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pemerintahan yang baik di Banten masih jadi impian segenap kalangan. Pasalnya, seringkali pemerintah Banten belum dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan baik. Salah satu buktinya ialah pengelolaan keuangan yang buruk. Laporan keuangan Pemda Banten mendapat opini *disclaimer* dari BPK dua kali berturut-turut, 2013 & 2014. Tahun 2015 LKPD Banten diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti masih sarat masalah. Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dimana nilai LAKIP Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia. Nilai LAKIP Banten tahun 2015 hanya 51.12 dengan predikat CC.

2. INFRASTRUKTUR JALAN

Kondisi infrastruktur di Banten terutama jalan masih memprihatinkan. Jalan rusak hampir tiap tahun bertambah, sehingga menghambat mobilitas warga serta memperlambat daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara kualitas, dari 852,89 km panjang jalan provinsi, hanya 45,12% kondisinya dinyatakan baik, 22,78% sedang, dan 32,10% dalam keadaan rusak. Yang lebih memprihatinkan, kondisi jalan dengan kategori rusak berat meningkat tajam dari 68,64 km tahun 2013 menjadi



213,47 km tahun 2014 (BPS Banten, 2016). Padahal ketersediaan jalan dengan kondisi baik sangat vital bagi warga Banten.

3. PENDIDIKAN

Tahun 2015, setidaknya terdapat kurang lebih 4.000 ribu ruang sekolah rusak parah. Belum lagi bicara soal terbatasnya alat peraga dan pelatihan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan. Saat ini, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Banten—sebagai indikator untuk menggambarkan seberapa banyak penduduk yang memiliki kesempatan memperoleh pendidikan—terutama untuk penduduk usia sekolah 16-18 tahun hanya 66,73 persen, lebih rendah ketimbang rata-rata nasional 70,61 persen. Begitu juga untuk penduduk usia 19-24 tahun hanya 19,68 persen, di bawah rata-rata nasional 22,95 persen.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM)—yaitu jumlah penduduk yang menjadi peserta didik sesuai dengan usia sekolahnya—pada jenjang pendidikan tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Paket C) dalam tiga tahun terakhir angkanya konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Tahun 2013 APM pendidikan tingkat menengah Banten 53,28 persen berbanding 54,25 persen APM nasional, tahun 2014 sebesar 56,87 persen berbanding 59,35 persen, dan tahun 2015 hanya 57,04 persen berbanding 59,71 persen (BPS Pusat 2016).

4. KESEHATAN

Saat ini masih terdapat 1.051 balita di Banten dengan status gizi buruk (BPS Banten, 2016). Jumlah terbanyak terdapat di empat kabupaten: Serang, Tangerang, Pandeglang dan Lebak. Ini akibat minimnya akses kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan pengetahuan orang tua terhadap nutrisi anak rendah, juga karena faktor ekonomi keluarga. Sementara, angka harapan hidup (AHH) Banten—sebagai salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat—masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 69,43 tahun saat lahir. AHH nasional 70,78 tahun (BPS Pusat, 2016).

Begitu juga soal ketersediaan dokter di Puskesmas. Tahun 2015, rasio dokter umum di Puskesmas per 100.000 penduduk di Banten paling rendah tingkat nasional, yaitu hanya 2,99 persen, di bawah rata-rata nasional 6,52 persen. Sementara, rasio dokter gigi per



100.000 penduduk Banten hanya 1,58 persen di bawah rata-rata nasional 2,56 persen. Kondisi sama juga terjadi pada rasio perawat dan rasio bidan di Puskesmas yang semuanya berada di bawah rata-rata nasional (Pusdatin Kemkes RI 2016).

5. PENGANGGURAN

Pengangguran merupakan masalah lama yang seolah tak pernah berhasil diatasi pemerintah Banten. Tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Banten mencapai 509.383 jiwa atau 9,55%. Angka ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional yang hanya 6,18% (BPS Banten, 2016). Yang lebih mengejutkan, ternyata tingkat pengangguran Banten 2015 tertinggi ketiga dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya, pemerintah sejauh ini gagal menciptakan kesempatan kerja. Banyak warga merasa susah mencari kerja di tengah biaya hidup yang makin mahal.

6. KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin Banten bertambah 47 ribu jiwa lebih dari tahun 2012 hingga 2015. Penduduk miskin 2015 mencapai 690,67 ribu jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 649,19 ribu jiwa (BPS Banten, 2016). Kemiskinan terburuk terjadi pada masyarakat perdesaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan. Periode Maret 2016, indeks kedalaman kemiskinan perdesaan mencapai 1,207 lebih tinggi daripada perkotaan 0,611 (BPS, 2016). Begitu juga tingkat keparahan kemiskinan perdesaan lebih parah ketimbang perkotaan.

7. KETIMPANGAN

Pertama, ketimpangan pendapatan antar penduduk atau kelompok masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Banten makin tajam antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Hal itu dibuktikan dengan indeks ini yang mencapai 0,40 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yakni 0,39 (BPS Pusat, 2016). Anehnya, angka itu cenderung tidak berubah selama tiga tahun. Meski dalam Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Agustus 2016, BPS menyebut rasio gini mengalami sedikit penurunan dari periode Maret 2015 s/d September 2015 sebesar 0,01 poin (hal yang sama juga terjadi pada indeks gini nasional), tetapi sekali lagi, angka ini masih sangat mengkhawatirkan. Sebab, sebagai gambaran, indeks gini Banten tahun 2002 hanya 0,33. Artinya,



ketimpangan makin melebar dari tahun ke tahun. *Kedua*, ketimpangan ekonomi antar daerah. Ini juga tinggi, terutama antara wilayah utara dan selatan Banten khususnya Lebak dan Pandeglang. Dua daerah penghasil produk pertanian ini, nilai produktivitas perekonomiannya jauh tertinggal dari daerah lain. Ketimpangan antar daerah di Banten tahun 2015 mencapai 0,60 (Indeks Williamson).

8. PERTANIAN

Potensi pertanian di Banten cukup besar. Setidaknya terdapat 448.704 hektar luas lahan pertanian pada tahun 2015, meliputi lahan sawah, tegal/kebun, ladang termasuk lahan yang sementara tidak diusahakan. Dari luas lahan itu, luas panen padi mencapai 386.676 hektar dan menghasilkan produksi padi 2.188.997 ton. Untuk luas panen tanaman palawija seluas 22.827 hektar yang menghasilkan produksi 125.016 ton. Sedangkan luas areal perkebunan mencapai 148.519 hektar dengan jenis perkebunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada dan kakau. Hanya saja, dari seluruh potensi itu, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten (termasuk peternakan) sangat kecil, yaitu 5,42 persen (BPS Banten, 2016). Belum lagi soal tingkat kesejahteraan petani di perdesaan yang sangat perlu mendapat perhatian.

9. MARITIM

Seperti halnya pertanian, potensi maritim Banten juga sangat besar. Namun dari potensi itu, pengelolannya belum maksimal sehingga belum memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan nelayan. Tahun 2015, total produksi perikanan 174.176,91 ton dengan besaran kontribusi terhadap PDRB hanya 0,53 persen (BPS Banten, 2016). Beberapa faktor yang disinyalir jadi penyebab, salah satunya, adalah terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, minimnya fasilitas penunjang produksi dan fasilitas infrastruktur lainnya. Rumah tangga perikanan laut mencapai 8.207 rumah tangga yang tersebar di Pandeglang, Lebak, Kabuapten Tangerang, Serang, Cilegon, dan Kota Serang.



10. SAMPAH DAN LINGKUNGAN

Produksi sampah yang terus bertambah telah menyebabkan daya dan kapasitas pengelolaannya di tiap kabupaten/kota kewalahan. Dari 8 kabupaten/kota, kabupaten Tangerang dengan jumlah rumah tangga paling besar menghasilkan timbunan sampah paling banyak, yaitu 6.101,86 m³/hari, diikuti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan mengenai kerusakan lingkungan, total kerusakan hutan tahun 2015 mencapai 1.003,57 hektar dan kerusakan Mangrov 1.212,42 hektar (dalam dan luar kawasan hutan). Demikian pula soal pencemaran air sungai khususnya di 5 sungai utama Banten (Siujung, Cidurian, Cisadane, Cibanten, Cirarab) di mana parameter pencemarannya melebihi baku mutu. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, kekeringan, longsor dan gempa bumi dengan jumlah korban 5.411 korban jiwa dan kerugian kurang lebih 42 miliar (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten 2015).

11. PERMUKIMAN

Permukiman atau perumahan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Permukiman yang nyaman, aman, sehat dan layak huni menunjukkan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2015, di Banten masih terdapat 10,22 persen rumah tangga kumuh khususnya di wilayah perdesaan, lebih tinggi dibanding perkotaan 4,55 persen. Angka ini tidak hanya menggambarkan masih banyaknya jumlah rumah tangga kumuh, lebih dari itu, juga membuktikan adanya ketimpangan pembangunan dan distribusi kesejahteraan. Selain itu, akses rumah tangga terhadap air minum layak tahun 2015 sedikit menurun ketimbang 2014, yakni dari 67,76 persen ke 67,68 persen. Penurunan juga terjadi pada akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dari 68,09 persen tahun 2014 menjadi 67,04 tahun 2015 (BPS Banten, 2016).

12. TRANSPORTASI

Kondisi eksisting pelayanan transportasi di Banten belum sepenuhnya mendukung terhadap kelancaran mobilitas warga dan pertumbuhan daya saing daerah. Beberapa permasalahan yang ada seperti belum terintegrasinya jaringan jalan lintas utara dan



lintas selatan yang melingkar di pesisir pantai, tingginya pelanggaran muatan angkutan barang yang menyebabkan kerusakan jalan, belum terpadunya jaringan KA dengan moda transportasi lain, termasuk terbatasnya jaringan KA pada koridor padat angkutan komuter lintas utama Tangerang-Jakarta harus diatasi. Begitu juga mengenai sejumlah terminal yang perlu direvitalisasi untuk meningkatkan kapasitas dan fungsinya agar lebih memadai. Layanan angkutan massal yang nyaman, aman, tepat waktu dan terintegrasi mesti jadi fokus perhatian pemerintah Banten ke depan.

13. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Banten mencapai 11.955.243 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,14 persen dimana tahun 2014 jumlahnya 11.704.877 jiwa (BPS Banten, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk Banten ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kualitas penduduk yang, salah satunya, dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2015, laju IMP Banten hanya 0,54 persen atau 0,38 poin, paling lambat keenam nasional (BPS 2016, diolah). Dari delapan kabupaten/kota, masih terdapat tiga kabupaten yang nilai IPMnya masih berada di bawah rata-rata nasional.

14. KEAGAMAAN

Saat ini, terdapat 3.591 lembaga pendidikan keagamaan formal (RA, MI, MTs, MA) dengan 459.479 murid dan 24.547 guru, dan 3.267 lembaga pondok pesantren dengan 277.066 santri dan 6.892 guru (BPS Banten, 2016). Jumlah ini belum ditambah jumlah lembaga, organisasi atau tempat peribadatan yang menjalankan pendidikan keagamaan seperti pengajian di Masjid/Mushalla dan sejenisnya. Keberadaan pendidikan tersebut telah berperan besar bagi penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal Banten yang religius. Akan tetapi, perhatian terhadap mereka tampak kurang sehingga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peranan mereka di tengah tatanan sosial yang makin kompleks.



15. DAYA SAING

Pertama, secara makro, rata-rata pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2015 mencapai 5,37 persen lebih rendah daripada tahun 2013 dan 2014, masing-masing 6,67 persen dan 5,47 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Banten triwulan II 2016 melambat dibandingkan triwulan II 2015 (*y-on-y*), yaitu 5,16 persen berbanding 5,21 persen. *Kedua*, nilai ekspor Provinsi Banten tahun 2015 sebesar US\$ 9,04 miliar, menurun ketimbang tahun 2014 sebesar US\$ 10,23 miliar. Nilai impor Banten tahun 2015 juga mengalami penurunan dari US\$ 12,18 miliar menjadi US\$ 9,85 miliar. Namun begitu, ekspor neto masih tetap negatif, yaitu -805,72. *Ketiga*, nilai investasi Banten untuk Penanaman Modal Asing tahun 2015 sebesar US\$ 2.541.970 dan nilai investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri Rp 10.709.896,40 (BPS Banten, 2016). Hanya saja, besarnya nilai tersebut kurang memberikan dampak signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran mengingat serapan terhadap tenaga kerja cukup rendah.

16. KORUPSI

Persoalan korupsi di Banten perlu mendapat perhatian khusus mengingat praktik beserta dampaknya sudah bersifat sistemik. Isu korupsi dalam beberapa tahun terakhir terus menguap sehingga dirasakan mengganggu proses pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terkuaknya beberapa kasus oleh penegak hukum, di satu sisi telah mempertebal persepsi korupsi masyarakat tentang pemerintahan, namun di sisi lain sejatinya dapat menjadi momentum bersama untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dan mendasar.

17. BIROKRASI

Hingga kini, rendahnya kinerja birokrasi Banten masih menjadi persoalan seolah tak pernah serius dituntaskan. Hal tersebut tergambar dari hampir semua aspek penilaian kinerja yang menuntut adanya kedisiplinan, transparansi, akuntabilitas dan integritas. Budaya birokrasi masih jauh dari orientasi pelayanan. Aparatur yang tersedia pun kurang berfungsi maksimal akibat rendahnya manajemen sumber daya manusia. Di sini, kehadiran sosok pemimpin yang kuat, tegas serta memahami sendi-sendi birokrasi (*firm*



leadership) sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan fundamental. Selama birokrasi tidak digerakkan dengan benar maka selama itu pula perubahan hanya tinggal asa.

18. BANJIR

Kerusakan hutan dan daya dukung lingkungan lainnya telah menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah titik wilayah Banten. Tahun 2015, banjir terjadi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Di Pandeglang, area yang terendam banjir seluas 55.707 hektar dengan jumlah korban 5.366 jiwa dan perkiraan kerugian 15 miliar. Di Lebak, area yang terendam seluas 416 hektar, korban jiwa 45 orang dan perkiraan kerugian 1 miliar. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan area terendam seluas 90 hektar dan kerugian mencapai 350 juta (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten 2015). Tentu saja fakta ini jadi momok menakutkan bagi warga sehingga perlu upaya penjegahan sedini mungkin.

19. PARIWISATA

Provinsi Banten menyimpan kekayaan wisata yang jika dikembangkan potensial menjadi daerah tujuan pariwisata. Apalagi secara geografis Banten berbatasan dengan Jakarta, Jawa Barat dan Pulau Sumatera sehingga sangat strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata. Terdapat 185 lokasi wisata sejarah, 133 lokasi wisata tirta, 85 wisata marina pantai, 6 suaka alam, 123 situs bersejarah, 217 makan sejarah, 4 musium dan 154 wisata lainnya. Jumlah wisatawan tahun 2015 mencapai 14.243.949 orang (BPS Banten, 2016). Kendati demikian, kuat dugaan jumlah ini bukan jumlah wisatawan terhadap objek wisata melainkan jumlah wisatawan terhadap hotel dan akomodasi lainnya. Karena itu, perlu perhatian untuk meningkatkan pengelolaan sektor wisata di Banten. Termasuk salah satunya, objek wisata Banten Lama.

20. TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Seiring meningkatnya industri di wilayah Banten juga semakin bertambahnya pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas lainnya sedikit banyak telah mengikis pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Terutama di



wilayah perkotaan, kebutuhan akan RTH semakin terasa mengingat pemanfaatan lahan untuk pembangunan makin massif, bahkan seringkali melanggar ketentuan. Di sisi lain, penataan ruang di Banten belum efektif akibat belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang maupun karena belum selarasnya rencana tata ruang provinsi dengan kabupaten/kota, termasuk dengan daerah perbatasan. Akibatnya, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang masih sangat lemah.

21. EKONOMI KREATIF

Ekonomi kreatif terutama di sektor industri rumah tangga, perdagangan dan jasa sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan warga. Kemampuan warga untuk mengembangkan produk unggulan yang kreatif dan inovatif perlu didorong dengan memberikan dukungan akses permodalan. Tumbuhnya ekonomi kreatif akan membuka sumber pendapatan baru yang dapat menyokong ekonomi domestik warga.



ISU STRATEGIS

Dari 21 persoalan umum yang telah diuraikan di atas, kami kemudian merangkumnya ke dalam 4 isu strategis, yaitu:

1. Buruknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak terhadap buruknya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi;
2. Buruknya kualitas infrastruktur seperti jalan, bangunan, jembatan yang berdampak pada terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses ekonomi masyarakat;
3. Buruknya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berdampak pada terhambatnya proses pelayanan pendidikan dan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki;
4. Buruknya kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berdampak terhambatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka visi dirumuskan sebagai berikut:



VISI

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

Maju berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* dipakai. Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan *mindset* atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah..

Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter investasi seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketersediaan energi menjadi tolok ukurnya.

Sejahtera diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.

Akhlakul Karimah menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya.



MISI

Untuk mencapai Visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.



PRIORITAS PROGRAM

A. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

1. Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
4. Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari *Disclaimer* / WDP ke WTP);
5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
6. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
7. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur

1. Pembangunan 273.000 Meter Ruas Jalan Provinsi yang Rusak dari Total 852.000 Meter Jalan Provinsi;
2. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk Membuka Jalur Isolasi dan Membuka Interkoneksi Antar Wilayah;
3. Pembangunan dan Perbaikan Jembatan pada Seluruh Jalan Provinsi;
4. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk Mempermudah Akses Penduduk terhadap Pelayanan Publik dan Kegiatan Ekonomi;
5. Normalisasi 32 Sungai dari Seluruh Sungai yang Ada di Banten;
6. Normalisasi 41 Situ untuk Pengembalian Fungsi Situ;
7. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
8. Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;



9. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam Rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta Kearifan Lokal;
10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
11. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
13. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan, Irigasi, dll).

C. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas

1. Pembangunan 2.016 Ruang Kelas Baru/168 Unit Sekolah untuk jenjang SMA dan SMK untuk Meningkatkan APK dari 66 ke 80, Setara Biaya 705 Miliar;
2. Pembangunan 1.563 Ruang Kelas Baru atau 130 Unit Sekolah untuk Jenjang SMP untuk Meningkatkan APK dari 79 ke 90, Setara Biaya 550 Miliar;
3. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 bagi 343 Guru SMA dan 820 Guru SMK;
4. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 bagi 2900 Guru SMP;
5. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 bagi 7832 Guru SD;
6. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 bagi 500 Guru SD, SMP, SMA, SMK;
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk 1.000 PAUD dan TK;
8. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui Pemberian Insentif bagi 110.996 Guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK;
9. Pembangunan 1.000 Perpustakaan dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Setara Biaya 100M;
10. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi 1.000 siswa SD, SMP, SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;



11. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama serta Membentuk Karakter yang Berakhlaqul Karimah.

D. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
2. Pembangunan 77 Puskesmas Baru untuk Mencapai Rasio 1 Kecamatan 2 Puskesmas;
3. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi 440 Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
5. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada Masyarakat melalui Pembangunan 8 Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.

E. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
2. Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;



6. Peningkatan Kemampuan Angkatan Kerja untuk Memasuki Dunia Kerja melalui Peningkatan Fungsi Balai Latihan Kerja dan Fungsi Pendidikan Formal lainnya.

PENUTUP

Demikian VISI, MISI dan PROGRAM kami sebagai rencana pembangunan yang akan kami laksanakan untuk lima tahun ke depan. Sekali lagi, visi, misi dan program ini menjadi tekad kami untuk mengabdikan pada masyarakat Banten dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama. Hanya kepada Tuhan kami berserah diri, dan kepada-Nya pula segala amal perbuatan dipertanggungjawabkan.

Serang, 22 September 2016

Calon Gubernur Banten

Calon Wakil Gubernur Banten

(Dr. H. Wahidin Halim, M.Si)

(H. Andika Hazrumi, S.Sos, M.AP)



WH - ANDIKA

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten 2017 - 2022